



**Judul** : Ketergantungan terhadap valas tinggi, legislator sarankan langkah strategis perbaiki nilai rupiah  
**Tanggal** : Sabtu, 06 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Ketergantungan Terhadap Valas Tinggi

# Legislator Sarankan Langkah Strategis Perbaiki Nilai Rupiah

**Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini. Salah satunya, struktur ekonomi nasional selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valas asing (valas).**

MENURUTNYA, kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit. "Jadi diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya," kata Kamrussamad di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat ditutup turun 4,2 persen ke level 5.594. Dan nilai tukar rupiah di kisaran lebih dari Rp18.000 per dolar AS.

Kamrussamad melanjutkan, salah satu langkah yang dapat segera dilakukan Pemerintah adalah mengaktifkan kembali skema *Local Currency Settlement* (LCS). Transaksi bilateral antar-negara yang menggunakan mata uang lokal ini telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang, seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan negara lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS. Sehingga tekanan terhadap

cadangan devisa dan nilai tukar rupiah dapat diminimalkan.

Dia menjelaskan, penguatan LCS menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dengan semakin banyak transaksi perdagangan yang menggunakan mata uang lokal, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global.

Karena itu, pelemahan rupiah saat ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas, Pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.

La optimistis, berbagai kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah, termasuk implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan cadangan devisa nasional. Namun, hasilnya memang tidak dapat dirasakan secara instan dan membutuhkan

waktu.

Kamrussamad meyakini, kombinasi antara penguatan cadangan devisa, optimalisasi LCS, dan perbaikan struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan.

"Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal," kata politikus Gerindra ini.

Sementara, anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar menyoroti derasnya arus modal keluar yang mencatatkan jual bersih hingga Rp 66,20 triliun sepanjang tahun berjalan atau 2026. Kondisi ini mengkhawatirkan karena terjadi secara spesifik di Indonesia, sementara bursa saham negara berkembang lainnya seperti Taiwan dan Vietnam justru tumbuh positif.

"Sebenarnya investor global tidak sedang menjauhi pasar negara berkembang, tapi secara spesifik mengurangi eksposur investasi mereka di Indonesia," ujar Marwan di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Marwan menerangkan, berdasarkan Indeks iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO), Indonesia mencatat return minus 28,6 persen sejak awal 2025. Masalah utama bukan soal kemampuan ekonomi

untuk tumbuh, tapi runtuhnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar.

Dia menyebut sejumlah faktor krusial yang membuat investor global mulai menjauhi pasar modal domestik Indonesia. Seperti penyusutan daya beli kelas menengah, tekanan terhadap rupiah, outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch, serta tingginya risiko komunikasi kebijakan dari Pemerintah.

Selain itu, ungkap Marwan, pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir kerap dikejutkan oleh regulasi regulasi krusial yang muncul secara mendadak tanpa koordinasi dan komunikasi publik yang matang. Seperti saat pelaku pasar tengah beradaptasi mencerna implementasi kebijakan badan baru Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan regulasi baru Devisa Hasil Ekspor (DHE), Pemerintah tiba-tiba meluncurkan aturan baru terkait pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kebijakan ini memberikan pukulan beruntun bagi kenyamanan berinvestasi," kata politikus PKB ini.

Marwan mengungkapkan, pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka, tetapi mereka sedang mencari alasan buat berhenti menjual. Tugas Pemerintah adalah

memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum.

Untuk itu, Marwan mendesak Pemerintah dan otoritas moneter agar segera mengeksekusi beberapa langkah taktis sebelum penilaian indeks oleh pelaku global penting seperti *Financial Times Stock Exchange* (FTSE) dan *Morgan Stanley Capital International* (MSCI) dilakukan pada pertengahan Juni ini. Caranya dengan menghentikan pengumuman regulasi baru yang bersifat restriktif atau membatasi secara mendadak.

"Setiap cetak biru kebijakan ekonomi makro harus dikomunikasikan secara transparan, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif," beber dia.

Bank Indonesia (BI), tambah Marwan, juga harus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter untuk menahan laju pelemahan rupiah yang dapat memicu kepanikan sistemik di sektor riil. Pemerintah juga wajib memberikan jaminan pengelolaan fiskal atau anggaran yang kredibel dan akuntabel untuk mempertahankan peringkat investment grade di Standard & Poor's (S&P) yang saat ini masih stabil.

"Yang terpenting lagi memitigasi dampak dari outlook negatif Moody's dan Fitch," pungkasnya.

■ TIF